

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYAJIAN INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA
PADANG PANJANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

OLEH:



JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2019

ABSTRAK

RelitaDwiAndini, 1210833003, JurusanIlmuPolitik, UniversitasAndalas, JudulSkripsi; “Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kota Padang Panjang.” Dibimbing oleh Dr. Aidinil Zetra, MA dan Dewi Anggraini, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 78 halaman dengan 12 Referensi : 5 Buku, 4 Jurnal, 1 Skripsi dan 2 Sumber Elektronik.

Akuntabilitas mempunyai arti pertangungjawaban yang merupakan salah satu ciri terapan *good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik. Artinya akuntabilitas menunjukkan apakah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks organisasi pemerintah, akunabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang terdiri dari empat akuntabilitas; akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Peneliti mendapat data dengan cara wawancara dan turun langsung ke lapangan. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Elwood terdiri atas beberapa dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Begitupun dengan Pemerintah daerah dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan analisis peneliti dengan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah daerah cukup akuntabel tetapi masih terdapat banyak masalah dan kendala yang harus segera dibenahi.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

ABSTRACT

RelitaDwiAndini, 1210833003, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis Title; “Local Government accountability in local Government Implementation Report Information Presentation in Padang Panjang City”Guided by Dr. Aidinil Zetra, MA and Dewi Anggraini, S.IP, M.Si. This thesis consists of 78 pages with 12 references: 5 books, 4 journals, 1 thesis, and 2 electronic sources.

Accountability means accountability which is one of the characteristics of good governance or good governance. This means that accountability shows whether services performed by the government are in accordance with applicable regulations. In the context of government organizations, public accountability is the provision of information and disclosure of government financial activities and performance to parties interested in the report which consists of four accountability; legal accountability and honesty, process accountability, program accountability, policy accountability. The researcher got the data by interview and went down directly to the field.

Public accountability that must be fulfilled by public sector organizations according to Elwood consists of several dimensions, namely legal accountability and honesty, process accountability, program accountability and policy accountability. Likewise with the regional government in presenting information on the implementation of regional government. Based on the analysis of researchers with Regional Government Accountability in the Presentation of Information on the Implementation of the Local Government Administration Report (ILPPD) in the City of Padang Panjang, it can be concluded that the regional government is accountable but there are still many problems and constraints that must be addressed.

Keywords : *Accountability, Local Government, implementation of regional government.*